

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Definisi Wilayah

Berbagai definisi mengenai wilayah dikemukakan oleh para ahli maupun kebijakan negara, antara lain adalah:

1. Menurut Saefulhakim, dkk (2002) wilayah adalah satu kesatuan unit geografis yang antar bagiannya mempunyai keterkaitan secara fungsional. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pewilayahan (penyusunan wilayah) adalah pendelineasian unit geografis berdasarkan kedekatan, kemiripan, atau intensitas hubungan fungsional (tolong menolong, bantu membantu, lindung melindungi) antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya.
2. Menurut Rustiadi, *et al.* (2006) wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu dimana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Sehingga batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat dinamis.
3. Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

#### 2.2 Pengertian Pembangunan/ Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah (*regional development*) merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Pada dasarnya pengembangan wilayah harus disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan permasalahan wilayah bersangkutan (Ambardi & Prihawantoro (ed), 2002).

Alkadri *et.al.* (2001) mengatakan bahwa pengembangan wilayah pada umumnya mencakup berbagai dimensi pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap awal, kegiatan pengembangan wilayah biasanya ditekankan pada pembangunan fisik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian diikuti dengan pembangunan sistem sosial dan politik. Namun begitu, tahapan ini bukanlah merupakan suatu ketentuan yang baku, karena setiap wilayah mempunyai potensi pertumbuhan yang

berbeda dengan wilayah lain. Potensi sumber daya alam, kondisi sosial, budaya, ekonomi masyarakat, ketersediaan infrastruktur dan lain-lain sangat berpengaruh pada penerapan konsep pengembangan wilayah yang digunakan.

### 2.3 Disparitas Wilayah

Beberapa faktor penyebab ketimpangan pembangunan antar wilayah sebagaimana yang dikemukakan Murty (2000), diantaranya adalah :

1. Faktor Geografis, suatu wilayah atau daerah yang sangat luas akan terjadi variasi pada keadaan fisik alam berupa topografi, iklim, curah hujan, sumber daya mineral dan variasi spasial lainnya.
2. Faktor Historis, perkembangan masyarakat dan bentuk kelembagaan atau budaya serta kehidupan perekonomian pada masa lalu merupakan penyebab yang cukup penting terutama yang terkait dengan sistem insentif terhadap kapasitas kerja.
3. Faktor Politis, tidak stabilnya suhu politik sangat mempengaruhi perkembangan dan pembangunan di suatu wilayah. Instabilitas politik akan menyebabkan orang ragu untuk berusaha atau melakukan investasi sehingga kegiatan ekonomi di suatu wilayah tidak akan berkembang.
4. Faktor Kebijakan, terjadinya kesenjangan antar wilayah bisa diakibatkan oleh kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang sentralistik hampir di semua sektor, dan lebih menekan pertumbuhan dan membangun pusat-pusat pembangunan di wilayah tertentu menyebabkan kesenjangan yang luar biasa antar daerah.
5. Faktor Administratif, kesenjangan wilayah dapat terjadi karena kemampuan pengelola administrasi. Wilayah yang dikelola dengan administrasi yang baik cenderung lebih maju.
6. Faktor Sosial, masyarakat dengan kepercayaan-kepercayaan yang primitif, kepercayaan tradisional dan nilai-nilai sosial yang cenderung konservatif dan menghambat perkembangan ekonomi. Sebaliknya masyarakat yang relatif maju umumnya memiliki institusi dan perilaku yang kondusif untuk berkembang.
7. Faktor Ekonomi, faktor ekonomi yang menyebabkan kesenjangan antar wilayah yaitu:
  - a. Perbedaan kuantitas dan kualitas dari faktor produksi yang dimiliki seperti: lahan, infrastruktur, tenaga kerja, modal, organisasi dan perusahaan.

- b. Terkait akumulasi dari berbagai faktor. Salah satunya lingkaran kemiskinan, konsumsi rendah, tabungan rendah, investasi rendah, dan kemudian kondisi masyarakat yang tertinggal, standar hidup rendah, efisiensi rendah dan jumlah pengangguran meningkat namun di wilayah yang maju, masyarakat maju, standar hidup tinggi, pendapatan semakin tinggi, tabungan semakin banyak yang pada akhirnya masyarakat semakin maju.
- c. Kekuatan pasar bebas telah mengakibatkan faktor-faktor ekonomi seperti tenaga kerja, modal, perusahaan dan aktivitas ekonomi seperti industri, perdagangan, perbankan, dan asuransi yang dalam ekonomi maju memberikan hasil yang lebih besar, cenderung terkonsentrasi di wilayah maju.
- d. Terkait dengan distorsi pasar, kebijakan harga, keterbatasan spesialisasi, keterbatasan keterampilan tenaga kerja dan sebagainya.

Menurut Anwar (2005), beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan yang menyebabkan ketimpangan (disparitas), di antaranya adalah:

1. Perbedaan karakteristik limpahan sumber daya alam.
2. Perbedaan demografi.
3. Perbedaan kemampuan sumber daya manusia.
4. Perbedaan potensi lokasi.
5. Perbedaan dari aspek aksesibilitas dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan.
6. Perbedaan dari aspek potensi pasar.

Akibat faktor-faktor tersebut maka dalam suatu wilayah akan terdapat beberapa macam karakteristik wilayah yang bisa dilihat dari aspek kemajuannya, yaitu:

1. Wilayah Maju, wilayah yang telah berkembang yang biasanya dicirikan sebagai pusat pertumbuhan. Di wilayah ini terdapat pemusatan penduduk, industri, pemerintahan, dan sekaligus pasar yang potensial. Selain itu juga dicirikan oleh tingkat pendapatan yang tinggi, tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia yang juga tinggi serta struktur ekonomi yang secara relatif didominasi oleh sektor industri dan jasa.
2. Wilayah Sedang Berkembang, wilayah yang sedang berkembang biasanya dicirikan oleh pertumbuhan yang cepat dan biasanya merupakan wilayah penyangga dari wilayah maju, karena itu mempunyai aksesibilitas yang sangat baik terhadap wilayah maju.

3. Wilayah Belum Berkembang, wilayah yang belum berkembang dicirikan oleh tingkat pertumbuhan yang masih rendah, baik secara absolut maupun secara relatif namun memiliki potensi sumber daya alam yang belum dikelola atau dimanfaatkan. Wilayah ini memiliki tingkat kepadatan penduduk yang masih rendah dengan tingkat pendidikan yang juga relatif rendah.

Wilayah Tidak Berkembang, wilayah yang tidak berkembang dicirikan oleh dua hal, yakni : (a) wilayah tersebut memang tidak memiliki potensi baik potensi sumber daya alam maupun potensi lokasi sehingga secara alamiah sulit berkembang dan tumbuh; dan (b) wilayah tersebut sebenarnya memiliki potensi, baik sumber daya alam atau lokasi maupun memiliki keduanya tetapi tidak dapat berkembang karena tidak memiliki kesempatan dan cenderung dieksploitasi oleh wilayah yang lebih maju. Wilayah ini dicirikan oleh tingkat kepadatan penduduk yang jarang dan kualitas sumber daya manusia yang rendah, tingkat pendapatan yang rendah, tidak memiliki infrastruktur yang lengkap, dan tingkat aksesibilitas yang rendah.

Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas pembangunan wilayah dijelaskan oleh Sjafrizal (2008) sebagai berikut:

1. Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam

Perbedaan kandungan sumber daya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Dengan demikian perbedaan kandungan sumber daya alam dapat mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah yang lebih tinggi.

2. Perbedaan Kondisi Demografis

Kondisi demografis yang dimaksudkan di sini meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografis ini akan dapat mempengaruhi disparitas pembangunan antar wilayah karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung

mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.

### 3. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang Dan Jasa

Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan disparitas pembangunan antar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi, baik yang disponsori oleh pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Demikian pula halnya dengan migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkannya. Akibatnya disparitas pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkan, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.

### 4. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi disparitas pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah di mana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Demikian pula sebaliknya bilamana konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah yang selanjutnya juga mendorong terjadi pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat. Konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, karena terdapatnya sumber daya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu. *Kedua*, meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut dan udara juga ikut mempengaruhi konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah. *Ketiga*, kondisi demografis (kependudukan) juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi di mana sumber daya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik.

### 5. Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah

Daerah yang mendapat alokasi investasi yang lebih besar dari pemerintah atau dapat menarik lebih banyak investor swasta akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat. Kondisi ini akan mendorong

proses pembangunan daerah melalui penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan perkapita yang lebih tinggi.

**Tabel 2. 1 Faktor-Faktor Disparitas Wilayah**

No.	Sumber	Faktor-Faktor	Faktor yang Dikaji	Keterangan
1.	Murty (2000)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faktor Geografis</li> <li>- Faktor Historis</li> <li>- Faktor Politis</li> <li>- Faktor Kebijakan</li> <li>- Faktor Administratif</li> <li>- Faktor Sosial</li> <li>- Faktor Ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faktor Geografis</li> <li>- Faktor Historis</li> <li>- Faktor Kebijakan</li> <li>- Faktor Ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faktor geografis digunakan untuk melihat perbedaan karakteristik wilayah studi</li> <li>- Faktor historis digunakan untuk melihat sejarah pertumbuhan wilayah</li> <li>- Faktor politis tidak digunakan karena bersifat eksklusif</li> <li>- Faktor kebijakan digunakan untuk melihat kebijakan pemerintah setempat terhadap kesenjangan wilayah</li> <li>- Faktor administrasi tidak digunakan karena penelitian ini tidak membahas mengenai pengelolaan administrasi</li> <li>- Faktor sosial tidak digunakan karena penelitian ini memfokuskan terhadap ekonomi dan infrastruktur</li> <li>- Faktor ekonomi digunakan untuk melihat kesenjangan perekonomian di setiap wilayah</li> </ul>
2.	Anwar (2005)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbedaan karakteristik limpahan sumber daya alam.</li> <li>- Perbedaan demografi.</li> <li>- Perbedaan kemampuan sumber daya manusia.</li> <li>- Perbedaan potensi lokasi.</li> <li>- Perbedaan dari aspek aksesibilitas dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan.</li> <li>- Perbedaan dari aspek potensi pasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbedaan karakteristik limpahan sumber daya alam.</li> <li>- Perbedaan Demografi</li> <li>- Perbedaan potensi lokasi</li> <li>- Perbedaan Aspek Aksesibilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbedaan karakteristik limpahan sumber daya alam dapat dilihat melalui hasil dalam PDRB</li> <li>- Perbedaan demografi/ penduduk akan berakibat pada perkembangan suatu wilayah</li> <li>- Perbedaan kemampuan sumber daya manusia tidak digunakan karena cakupan sosial yang terlalu luas</li> <li>- Perbedaan potensi lokasi dapat dilihat dalam letak geografis dan aksesibilitas wilayah</li> <li>- Perbedaan aksesibilitas akan sangat mempengaruhi distribusi ekonomi dan kemajuan wilayah</li> <li>- Perbedaan dari aspek potensi pasar tidak dikaji</li> </ul>

No.	Sumber	Faktor-Faktor	Faktor yang Dikaji	Keterangan
3.	Sjafrizal (2008)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbedaan kandungan sumber daya alam</li> <li>- Perbedaan kondisi demografis</li> <li>- Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa</li> <li>- Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah</li> <li>- Alokasi dana pembangunan antar wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbedaan kandungan sumber daya alam</li> <li>- Perbedaan Kondisi Demografis</li> <li>- Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah</li> </ul>	<p>karena sudah terwakilkan pada potensi sumber daya alam melalui PDRB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbedaan kandungan sumber daya alam dapat dilihat pada capaian PDRB</li> <li>- Kondisi demografis ini akan dapat mempengaruhi disparitas pembangunan antar wilayah karena hal ini akan berpengaruh pada rasio sarana prasarana dan PDRB perkapita.</li> <li>- Penelitian ini tidak membahas mengenai migrasi atau transmigrasi penduduk.</li> <li>- Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah di mana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar</li> </ul>

Sumber: Murty (2000), Anwar (2005), dan Sjafrizal (2008)

## 2.4 Pengertian Ekonomi Wilayah

Ekonomi wilayah adalah prinsip ekonomi yang dalam pembahasannya memasukkan unsur perbedaan potensi satu wilayah dengan wilayah yang lain (Tarigan, 2009). Analisis sektor unggulan merupakan analisis untuk mengetahui sektor unggulan didalam unit kecamatan kabupaten berdasarkan sumbangannya terhadap aktivitas ekonomi. Dalam melihat disparitas, terutama pada sektor kegiatan ekonomi dapat dilihat dengan PDRB, untuk mengetahui disparitas wilayah dengan PDRB dapat dilakukan melalui perhitungan Indeks Williamson.

### 2.4.1 Indeks Williamson

Indeks Williamson merupakan salah satu indeks yang digunakan dalam melihat disparitas yang terjadi antar wilayah dan lebih sensitif terhadap perubahan ketimpangan (Rustiadi et al. 2009; Portnov dan Felsenstein 2005). Indeks Williamson merupakan salah satu indeks yang paling sering digunakan untuk melihat disparitas antar wilayah secara horisontal. Indeks ini menggunakan nilai PDRB per kapita tiap kabupaten/kota. Indeks Williamson akan menghasilkan indeks yang lebih besar atau sama dengan nol. Menurut Rustiadi (2009), wilayah yang memiliki PDRB per kapita tinggi, dan jumlah penduduknya relatif kecil, tingkat kesenjangannya tidak terlalu tinggi. Namun, besaran PDRB per kapita suatu wilayah relatif moderat apabila dibandingkan dengan wilayah

lain yang kecil dengan jumlah penduduknya relatif besar, sehingga akan menyebabkan kesenjangan secara keseluruhan.

$$CV_w = \frac{\sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2 P_i}}{\bar{y}}, 0 < C_w < 1$$

**Dengan:**

$Y_i$  = PDRB perkapita daerah  $i$

$Y$  = PDRB perkapita rata-rata seluruh daerah

$P_i = f_i/n$  ( $f_i$  = Jumlah penduduk daerah  $i$ .  $n$  = Jumlah penduduk seluruh daerah )

Hasil perhitungan tersebut adalah jika indeks mendekati 1, maka daerah tersebut sangat timpang, namun jika indeks mendekati nol, berarti ketimpangan rendah.

## 2.5 Tinjauan Sarana dan Prasarana

Menurut Kamus Tata Ruang Dirjend Cipta Karya, komponen prasarana wilayah terbagi 3 golongan; yaitu prasarana transportasi, prasarana kesehatan, prasarana energi dan komunikasi. Tujuan dari penyediaan prasarana wilayah adalah untuk memenuhi kebutuhan penduduk terhadap prasarana wilayah serta untuk mengarahkan perkembangan wilayah sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Sistem infrastruktur menurut Kodoatie (2005) dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dalam hal ini Kodoatie (2005) menyebutkan 7 kelompok infrastruktur; antara lain transportasi seperti jalan raya, jalan, dan jembatan; komunikasi; serta bangunan yang semuanya dapat menjadi variabel-variabel yang digunakan dalam perhitungan *rating* kualitas infrastruktur. Dalam hal ini kualitas infrastruktur berbanding lurus dengan kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

### 2.5.1 Indeks Skalogram

Analisis skalogram merupakan salah satu alat untuk mengidentifikasi pusat pertumbuhan wilayah berdasarkan fasilitas yang dimilikinya, dengan demikian dapat ditentukan hierarki pusat-pusat pertumbuhan dan aktivitas pelayanan suatu wilayah dengan indeks sentralitas. Wilayah dengan fasilitas yang lebih lengkap merupakan pusat pelayanan, sedangkan wilayah dengan fasilitas yang kurang akan menjadi daerah belakang (*hinterland*).

Metode skalogram dapat digunakan untuk menentukan peringkat pemukiman atau wilayah dan kelembagaan atau fasilitas pelayanan. Asumsi yang digunakan adalah bahwa wilayah yang memiliki *ranking* tertinggi adalah lokasi yang dapat menjadi pusat pelayanan. Berdasarkan analisis ini dapat ditentukan prioritas pengadaan sarana dan prasarana di setiap unit wilayah yang dianalisis. Indikator yang digunakan dalam analisis skalogram adalah jumlah penduduk, jumlah jenis, dan jumlah unit yang dimiliki masing-masing kecamatan.

Menurut Budiharsono (2001), metode ini mempunyai beberapa keunggulan, antara lain:

1. Memperlihatkan dasar diantara jumlah penduduk dan tersedianya fasilitas pelayanan.
2. Secara cepat dapat mengorganisasikan data dan mengenal wilayah.
3. Membandingkan pemukiman-pemukiman dan wilayah-wilayah berdasarkan ketersediaan fasilitas pelayanan.
4. Memperlihatkan hierarki pemukiman atau wilayah.
5. Secara potensial dapat digunakan untuk merancang fasilitas baru dan memantaunya.

Menurut Tarigan (2006) penentuan orde perkotaan dapat didasarkan atas gabungan beberapa variabel. Variabel yang paling umum dianggap berpengaruh dalam menetapkan orde perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk perkotaan
2. Banyaknya fasilitas yang dimiliki seperti luas pasar, luas kompleks pertokoan, jumlah fasilitas pendidikan, jumlah fasilitas kesehatan, beragam jasa yang dimiliki (seperti jasa bank, jasa asuransi, jasa perbengkelan) dan lainnya.

Ada beberapa faktor yang tidak diragukan lagi menciptakan daya tarik bagi sebuah kota, misalnya pasar (termasuk toko serba ada/swalayan), kompleks pertokoan (ruko), fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Akan tetapi, cukup banyak fasilitas lain yang ada di perkotaan yang juga memiliki daya tarik dan apabila tidak dibatasi akan membuat daftar fasilitas menjadi sangat panjang. Fasilitas lain misalnya perbankan, apotek, notaris, pengacara, biro perjalanan, perkantoran, perbengkelan, tempat hiburan, restoran, hotel/penginapan, salon kecantikan, tukang pangkas, gelanggang olahraga, dan tempat ibadah. Apabila diinginkan, semua faktor lain dapat dimasukkan dalam analisis, tetapi bisa juga

disederhanakan dengan hanya memasukkan empat faktor utama tersebut. Penyederhanaan ini didasarkan atas asumsi bahwa banyak fasilitas lain berbanding secara proporsional dengan jumlah penduduk kota sehingga dengan memasukkan faktor jumlah penduduk kota maka faktor lain dianggap telah terwakili.

3. Tingkat aksesibilitas dari kota tersebut terhadap kota terdekat yang memiliki orde lebih tinggi di wilayah (misalnya, ibukota kabupaten/ibukota provinsi).

Yang dimaksud dengan tingkat aksesibilitas adalah kemudahan mencapai kota tersebut dari kota/wilayah lain yang berdekatan, atau bisa juga dilihat dari sudut kemudahan mencapai wilayah lain yang berdekatan bagi masyarakat yang tinggal di kota tersebut. Ada berbagai unsur yang mempengaruhi tingkat aksesibilitas, misalnya kondisi jalan, jenis alat angkutan yang tersedia, frekuensi keberangkatan, dan jarak

Ketiga faktor diatas bisa dianggap memiliki bobot yang sama tetapi bisa juga berbeda, sesuai dengan pengamatan di lapangan tentang faktor mana yang paling berpengaruh dalam membuat sebuah kota bisa menarik pengunjung kota lain. Faktor-faktor diatas juga dapat digunakan sebagai indikator dalam melihat besaran kesenjangan wilayah.

### **2.5.2 Indeks Sentralitas**

Indeks sentralitas merupakan bagian dari indeks fungsi wilayah atau yang sering disebut dengan analisis fungsi yang merupakan analisis terhadap fungsi-fungsi pelayanan yang tersebar di wilayah studi, dalam kaitannya dengan berbagai aktivitas penduduk/masyarakat, untuk memperoleh/memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut (Riyadi, 2003). Indeks sentralitas dimaksudkan untuk mengetahui struktur/hierarki pusat-pusat pelayanan yang ada dalam suatu wilayah perencanaan pembangunan, seberapa banyak fungsi yang ada, berapa jenis fungsi dan berapa jumlah penduduk yang dilayani serta seberapa besar frekuensi keberadaan suatu fungsi dalam satu satuan wilayah permukiman (Riyadi, 2003).

## **2.6 Infrastruktur Transportasi Wilayah**

Infrastruktur utama dalam transportasi darat adalah jalan. Sedangkan wilayah berarti suatu permukaan dengan batas-batasnya tertentu, dimana terjadi interaksi antar sumber daya (yaitu sumberdaya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya pembangunan lainnya). Dalam suatu wilayah, masing-masing pusat memiliki wilayah

pengaruh, dan antara pusat dan wilayah pengaruh dihubungkan oleh jaringan transportasi. Jadi, terdapat tiga unsur utama dalam pengembangan wilayah, yaitu:

1. Ada pusat pertumbuhan
2. Memiliki wilayah pengaruh
3. Dihubungkan oleh jaringan transportasi

Transportasi wilayah sebagai infrastruktur dalam pengembangan wilayah memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu menjangkau ke seluruh tempat dalam wilayah untuk mensuplai barang-barang kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat, selain dari itu adalah untuk mengumpulkan berbagai komoditas hasil sektor pertanian untuk dipasarkan keluar daerah. Disamping fungsi transportasi, terdapat puluhan fungsi perdagangan. Jasa transportasi dan jasa perdagangan menyatu menjadi jasa distribusi. Jadi fungsi infrastruktur transportasi di suatu wilayah ataupun antar wilayah, berarti dukungan terhadap pengembangan wilayah semakin besar, maka keberhasilannya dalam meningkatkan produksi lokal dan meningkatkan mobilitas penduduk lokal, serta meningkatkan interaksi sosial dan pembangunan wilayah menjadi semakin positif, intensif, dan responsif.

Menurut Adisasmita (2012) dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan transportasi melibatkan beberapa unsur dasar (*basic elements*), yaitu:

1. Moda transportasi
2. Prasarana jalan, trayek atau rute
3. Terminal, stasiun, pelabuhan laut dan bandar udara
4. Muatan barang dan manusia

Untuk menyelenggarakan kegiatan transportasi diperlukan tersedianya moda transportasi (kendaraan truk, mobil, kapal laut, dan pesawat udara) dan muatan (barang dan manusia) yang diangkut, melalui jalan yang tersedia atau trayek dan rute yang telah ditetapkan, menyinggahi tempat-tempat pemberhentian (terminal) selama dalam perjalanan.

Transportasi mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu menentukan keberhasilan pembangunan. Perekonomian diartikan sebagai kondisi yang meliputi berbagai kegiatan yang dikelompokkan dalam kegiatan produksi, transaksi, distribusi, dan konsumsi. Kondisi perekonomian terdiri dari beberapa tahapan, yaitu perekonomian tradisional, perekonomian yang transisi. Perkembangan perekonomian menurut tahapannya, mencerminkan kondisi transportasinya. Dalam tahap perekonomian modern, kondisi transportasi mengalami perkembangan sangat maju. Kondisi

perkembangan transportasi dan pembangunan memperlihatkan arah yang sama atau hubungan yang sangat positif.

Manfaat ekonomi dari transportasi dapat disebut sebagai berikut:

1. Transportasi yang cukup, dapat memperluas pasar. Pasar penjualan barang yang luas, berarti barang-barang yang dipasarkan lebih banyak, hal ini akan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi produsen
2. Transportasi yang lancar membantu terciptanya harga pasar yang stabil
3. Transportasi yang lancar mendorong daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya ekonomi yang berbeda-beda akan melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang/komoditi unggulannya
4. Transportasi yang lancar meningkatkan keterhubungan dan kerjasama antar daerah/wilayah.

### **2.6.1 Jalan**

Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. (UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

### **2.6.2 Hierarki Jalan**

Jaringan Jalan berdasarkan peranan (fungsi):

1. Jalan arteri, yaitu jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, jumlah jalan dibatasi secara efisien.
2. Jalan kolektor, yaitu jalan yang melayani angkutan pengumpul dengan ciri-ciri perjalanan sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah dibatasi.
3. Jalan lokal, yaitu jalan yang melayani angkutan setempat, dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah masuk tidak dibatasi.

### **2.6.3 Terminal**

Terminal merupakan titik simpul dari berbagai sarana angkutan yang berfungsi sebagai titik perpindahan penumpang dari satu sarana angkutan ke sarana angkutan lainnya dan sebagai tempat pengaturan, pergerakan kendaraan maupun penumpang dan merupakan titik awal maupun titik akhir perjalanan orang untuk melakukan perjalanan.

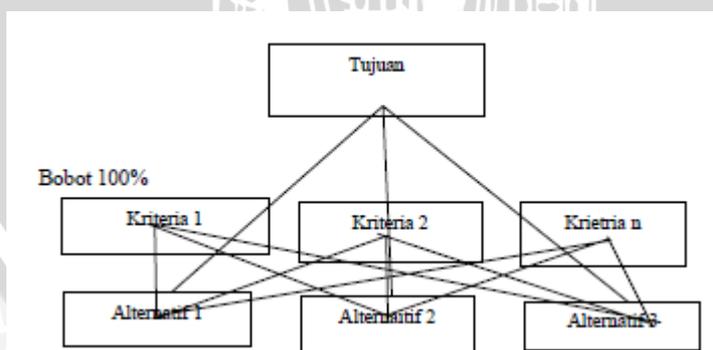
Di samping itu, terminal merupakan prasarana angkutan jalan dan sebagai sumber pembangkit.

Terminal penumpang dapat dikelompokan atas dasar tingkat penggunaan terminal kedalam tiga tipe sebagai berikut

1. Terminal penumpang tipe A berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.
2. Terminal penumpang tipe B berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan.
3. Terminal penumpang tipe C berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan

## 2.7 Analytical Hierarchy Process (AHP)

*Analytical Hierarchy Process* (AHP) adalah suatu metode unggul untuk memilih aktivitas yang bersaing atau banyak alternatif berdasarkan kriteria tertentu. Atau khusus. Kriteria dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif, dan bahkan kriteria kuantitatif ditangani dengan struktur kesukaan pengambil keputusan daripada berdasarkan angka. Struktur sebuah model AHP adalah model dari sebuah pohon terbaik. Ada suatu tujuan tunggal di puncak pohon yang mewakili tujuan dari masalah pengambilan keputusan. Seratus persen bobot keputusan ada di titik ini. Tepat di bawah tujuan adalah titik daun yang menunjukkan kriteria, baik kualitatif maupun kuantitatif. Bobot Tujuan harus dibagi di antara titik-titik kriteria berdasarkan rating.



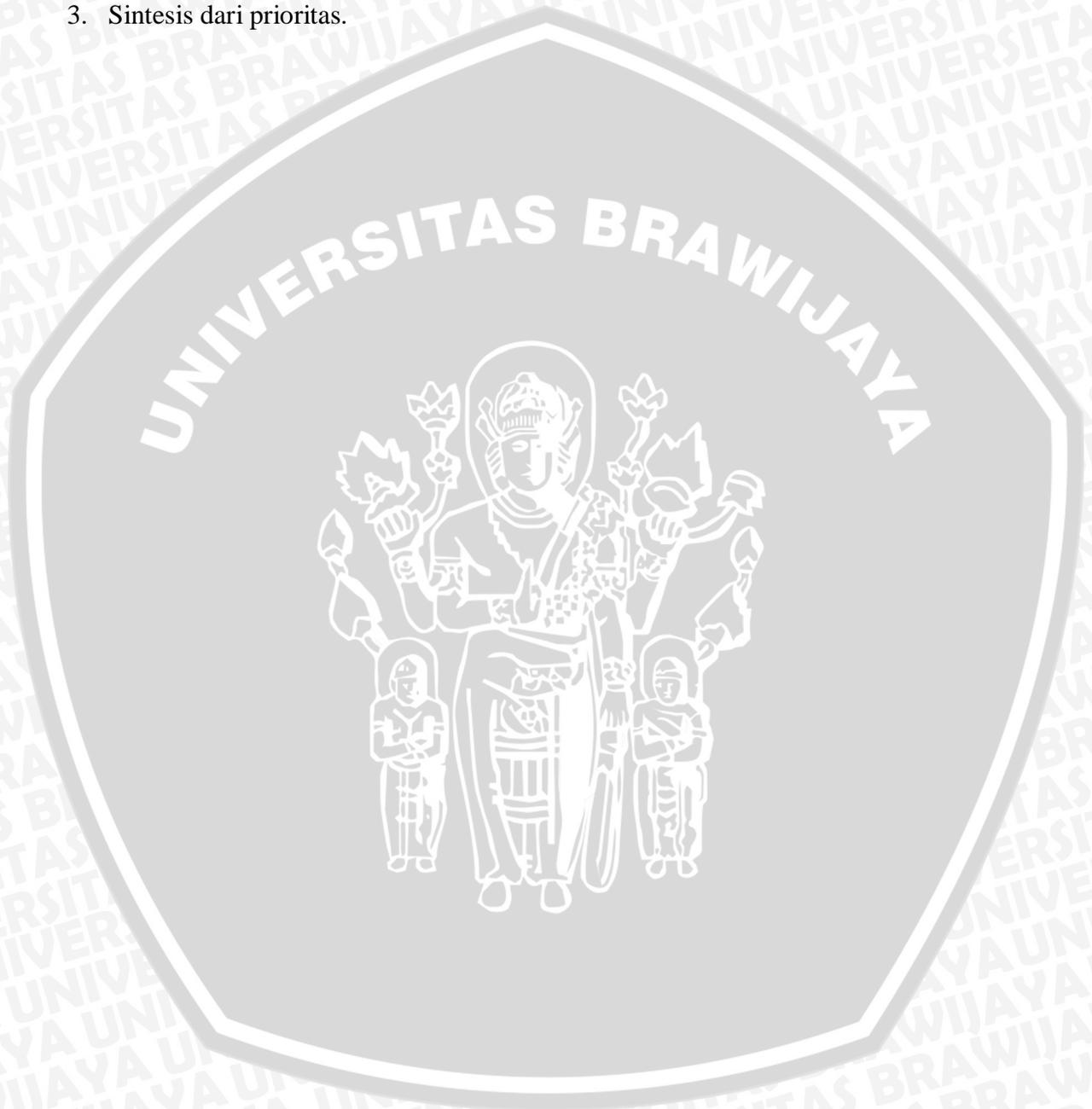
**Gambar 2. 1** *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Bobot dari tiap-tiap kriteria adalah 100 % dibagi dengan bobot titik-titik kriteria berdasarkan rating. Setiap alternatif dibandingkan dengan masing-masing kriteria. Pemilihan atau penyusunan prioritas dilakukan dengan suatu prosedur yang logis dan

terstruktur. Kegiatan tersebut dilakukan oleh ahli-ahli yang representatif berkaitan dengan alternatif-alternatif yang akan disusun prioritasnya (Bougeois, 2005).

Secara garis besar, ada tiga tahapan AHP dalam penyusunan prioritas, yaitu :

1. Dekomposisi dari masalah;
2. Penilaian untuk membandingkan elemen-elemen hasil dekomposisi; dan
3. Sintesis dari prioritas.



## 2.8 Penelitian Sebelumnya

**Tabel 2. 2 Penelitian Sebelumnya**

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Disparitas Sub Wilayah (Kasus Perkembangan Antar Kecamatan Di Kabupaten Tanah Datar) Rina Rezeki, 2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap terjadinya disparitas</li> <li>Menemukanali dan menganalisis karakteristik wilayah studi (fisik, sosial, ekonomi) serta mengkaji permasalahan disparitas di Kabupaten Tanah Datar</li> <li>Menentukan faktor-faktor utama yang mempengaruhi terhadap terjadinya disparitas.</li> <li>Menganalisis kebijaksanaan pembangunan dan interaksi ruang serta mengkaji konsep disparitas.</li> <li>Menemukanali konsep disparitas melalui Kabupaten Tanah Datar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan pemerintah</li> <li>Ketersediaan sarana</li> <li>Prasarana</li> <li>Kondisi Perekonomian</li> <li>Sosial kependudukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis deskriptif</li> <li>Analisis faktor</li> <li>LQ dan Tipologi</li> </ul>	Pembangunan dalam suatu wilayah tidak harus merata sampai ke seluruh pelosok. Hal ini bertujuan untuk menciptakan harmonisasi dalam suatu daerah dan juga untuk melindungi habitat dan ekosistem wilayah itu sendiri. Disparitas merupakan suatu strategi dalam pengembangan wilayah dan bukan merupakan suatu hal yang negatif.	Perbedaan yang mendasar adalah pada metode dan tujuan penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini tidak memakai analisis faktor dan LQ, namun menggunakan indeks williamson dan AHP.
2.	Analisis Disparitas Pembangunan Antar Wilayah Di Provinsi Sumatera Selatan. Brilliant Faisal, 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi sektor-sektor unggulan tiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.</li> <li>Menganalisis tingkat perkembangan wilayah di tiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.</li> <li>Menganalisis tingkat disparitas pembangunan antar wilayah di Provinsi Sumatera Selatan dan mendeskripsikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ekonomi</li> <li>Fisik</li> <li>Sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis Sektor Unggulan Wilayah</li> <li>Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah</li> <li>Analisis Disparitas Antar Wilayah</li> <li><i>Analytical Hierarchy Process (AHP)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sektor perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan masih didominasi oleh sektor pertanian sebagai aktivitas perekonomian yang mampu bersaing secara komparatif.</li> <li>Selama kurun waktu 2003-2007 tingkat perkembangan perekonomian wilayah di Provinsi Sumatera Selatan berjalan lambat. Pengaruh Kota Palembang yang begitu besar</li> </ul>	Pada penelitian ini perbedaanya adalah tidak mengidentifikasi sektor unggulan.

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
		<p>penyebab terjadinya disparitas pembangunan tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prioritas pembangunan wilayah, terutama di pesisir Sumatera Selatan berdasarkan persepsi oleh Pemerintah Daerah.</li> </ul>			<p>sebagai wilayah pusat pembangunan sekaligus pelayanan menyebabkan aktivitas perekonomian dan tingkat perkembangan wilayah lain menjadi terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat disparitas antar wilayah di Provinsi Sumatera Selatan masih tergolong sangat tinggi, terutama yang dipengaruhi sektor migas. Adapun faktor-faktor penduga penyebab terjadinya disparitas antar wilayah berasal dari sektor pertambangan dan penggalian dan sektor sektor sekunder serta luas hutan negara yang berkorelasi positif terhadap disparitas pembangunan antar wilayah; sedangkan sektor pertanian berkontribusi terhadap menurunnya disparitas.</li> <li>• Pengembangan sektor industri pengolahan berbasis pertanian merupakan prioritas pembangunan di wilayah pesisir Provinsi Sumatera Selatan yang didasari oleh persepsi pejabat aparaturnya pemerintah daerah, guna mendukung kebijakan SUMSEL sebagai lumbung pangan</li> </ul>	

Sumber: Rezeki (2007) dan Faisal (2010)

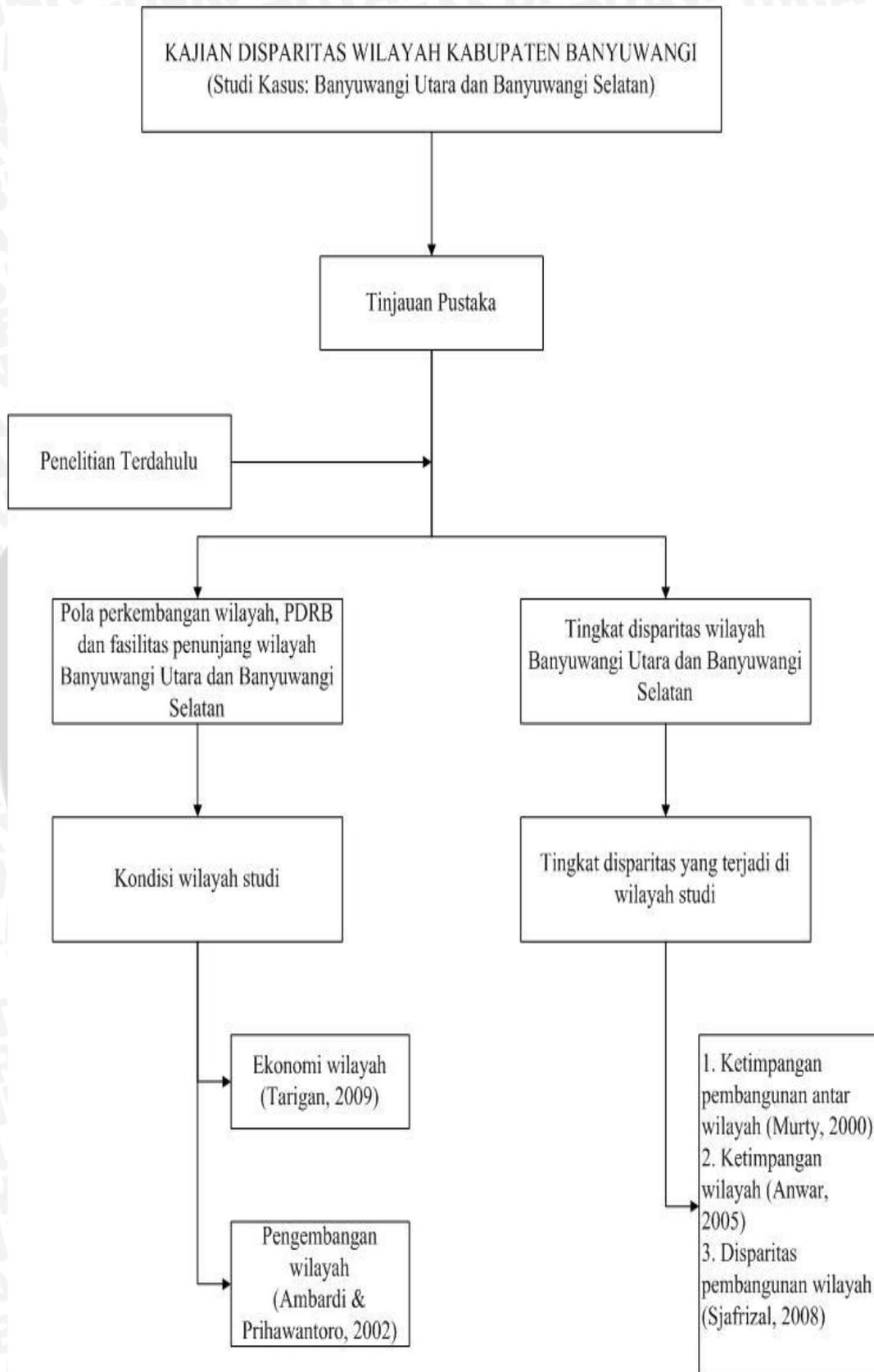
Tabel 2. 3 Referensi Jurnal Dan Buku

No.	Judul	Tujuan	Variabel	Metodologi	Hasil Pembahasan
1.	<i>Infrastructure Development and Economic Growth: An Explanation for Regional Disparities in China?</i> (Demurger, S. 2000. <a href="http://www.ideallibrary.com">http://www.ideallibrary.com</a> )	• Untuk membuktikan fakta empiris pada jaringan antara investasi infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di China	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PDRB</li> <li>• Transportasi</li> <li>• Telekomunikasi</li> <li>• Kepadatan penduduk</li> <li>• Listrik</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• kemiskinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Williamson</li> <li>• Ekonometrik</li> </ul>	• Fasilitas transportasi adalah kunci yang membedakan faktor yang menjelaskan kesenjangan pertumbuhan dan poin pada peran dari telekomunikasi dalam mengurangi beban isolasi.
2.	<i>Regional Development Disparities in Malaysia</i> (Krimi, M., Yusop, Z., Hook, L. 2010. <i>Journal of American Science</i> )	• Untuk mencapai keseimbangan perkembangan wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rata-rata pendapatan rumah tangga bulanan</li> <li>• kemiskinan</li> <li>• urbanisasi</li> <li>• pengangguran</li> <li>• PDRB Per Kapita</li> <li>• Kepadatan jalan</li> <li>• Kapasitas Produksi dari pelayanan air</li> <li>• Pendidikan dasar</li> <li>• Proporsi siswa sekolah dasar</li> <li>• Angka melek huruf</li> <li>• Mortalitas</li> <li>• Kematian akibat malaria</li> <li>• Kematian akibat TBC</li> <li>• Proporsi penduduk dengan akses sumber air bersih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution)</li> <li>• Shannon Entropy</li> <li>• Development Index (DI)</li> </ul>	• Selama periode perencanaan ke-delapan, usaha menjalankan promosi keseimbangan perkembangan wilayah. Meskipun semua wilayah mencatat pertumbuhan ekonomi, kesenjangan pertumbuhan antar wilayah.
3.	<i>Infrastructure, Openness, and Regional Inequality In India</i> (Zhang & Fan. 2002. <i>International Food Policy Research Institute</i> .)	• Untuk mengukur haluan perangkat terbelakang dari pengamatan perbedaan ekonomi di India	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PDRB Perkapita</li> <li>• Pengeluaran perkapita</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Kepadatan jalan</li> <li>• Geografi</li> </ul>	• variance of $y$ in equation	• pada pendekatan ekonomi dengan pertanian sebagai model predomnan dari produksi, keuntungan komparatif adalah utamanya oleh perbedaan kualitas tanah dan perbedaan iklim antar

No.	Judul	Tujuan	Variabel	Metodologi	Hasil Pembahasan
	Washington DC)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• iklim</li> </ul>		negara.
4.	Regional Inequalities in the EU Enlargement Countries: An Analysis of Small Versus Large New Member States by George Petrakos, Yiannis Psycharis and Dimitris Kallioras (Felsenstein & Portnov. 2005. Regional Disparities in Small Countries: Advances in Spatial Science. Springer: New York)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• untuk menginvestigasi apakah kesenjangan wilayah berlanjut pada peningkatan di akhir 1990s dan apakah level dari kesenjangan dipengaruhi oleh ukuran negara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi</li> <li>• Demografi</li> <li>• Karakteristik wilayah</li> <li>• PDRB Per kapita</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weight coefficient of variation</li> <li>• The max/min ratio</li> <li>• The <math>\beta</math>-convergence index</li> <li>• The NUTS III level</li> <li>• Diagramatic analysis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa kecilnya ukuran negara EU mungkin digolongkan oleh ketinggian relatif level dari kesenjangan wilayah yang mungkin tidak berbeda secara signifikan dari besarnya negara.</li> </ul>
5.	The Dynamics of Regional Disparities in a Small Country: The Case of Slovenia by Peter Wostner (Felsenstein & Portnov. 2005. Regional Disparities in Small Countries: Advances in Spatial Science. Springer: New York)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk membandingkan dinamika dari variabel individu dengan wilayah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PDRB</li> <li>• Jumlah industri</li> <li>• Jumlah pekerja</li> <li>• Kepadatan penduduk</li> <li>• Pendidikan penduduk</li> <li>• kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aglomerasi</li> <li>• Regresi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi dari wilayah harus tergantung salah satu elemen penting dalam penunjukkan strategi pengembangan wilayah</li> </ul>

Sumber: Demurger (2000), Krimi, M., Yusop, Z., Hook, L. (2010), Zhang & Fan. (2002), Felsenstein & Portnov (2005)

## 2. 11 Kerangka Teori



Gambar 2. 2 Kerangka Teori